



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROPORSI PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) AKTIF DAN FERTILITAS DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Sang Ayu Ade Rismha Dwi Sukma Yoni¹ I Ketut Sudibia²

Article history:

Submitted: 7 Agustus 2022
Revised: 21 Agustus 2022
Accepted: 4 September 2022

Keywords:

Fertility;
Percentage of poor people;
Level of education;
Government spending;
Proportion of active family planning participants.

Kata Kunci:

Fertilitas;
Persentase penduduk miskin;
Tingkat pendidikan;
Pengeluaran pemerintah;
Proporsi peserta KB aktif.

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia
Email:
rismhayoni182@gmail.com

Abstract

The aims of this study were: 1) to analyze the effect of education level, poverty, and government spending on the proportion of active family planning participants 2) to analyze the effect of education level, poverty, government spending and the proportion of active family planning participants on fertility 3) to determine the indirect effect of education level, poverty, government spending on fertility through the proportion of active family planning participants. This research was conducted in the regency/city of Bali Province which consists of 8 regencies and 1 city. The data analysis technique used in this research is path analysis. The results showed that 1) the proportion of the poor had a negative and insignificant effect on the proportion of family planning participants while the percentage of the poor had a positive and significant effect on fertility, 2) the level of education and government expenditures had a positive and significant effect on the proportion of family planning participants but the level of education and education expenditures the government has a negative and significant effect on fertility, 3) the proportion of active family planning participants can mediate the variables of the poor population, education level and government spending on fertility.

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah terhadap proporsi peserta KB aktif 2) menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan proporsi peserta KB aktif terhadap fertilitas 3) mengetahui pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan, kemiskinan, pengeluaran pemerintah terhadap fertilitas melalui proporsi peserta KB aktif. Penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Bali yakni terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *path analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) persentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap proporsi peserta KB aktif sedangkan persentase penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap fertilitas, 2) tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi peserta KB aktif namun tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fertilitas, 3) proporsi peserta KB aktif dapat memediasi variabel persentase penduduk miskin, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap fertilitas.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan begitu pula sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan memperlancar pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara (Rapanna & Fajriah, 2018). Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Pertambahan jumlah penduduk di suatu negara berkembang saat ini harus segera diatasi untuk mempercepat laju perkembangan ekonomi salah satunya yaitu dengan menekan laju pertumbuhan penduduk. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk bermakna positif yaitu untuk menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan (Wauran, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk masih sangat tinggi dan penduduk terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika Serikat (Kurniawati & Sugianto, 2021). Hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa (BPS, 2020). Sejak tahun 1970an Indonesia berkomitmen untuk mengendalikan angka kelahiran (*control fertility*) melalui program Keluarga Berencana (KB). Provinsi Bali, selain provinsi-provinsi di Pulau Jawa dipilih untuk mengawasi pelaksanaan program KB di Indonesia. Sekitar tahun 1970an, yang merupakan tonggak awal pelaksanaan program KB angka kelahiran total atau *total fertility rate* (TFR) Provinsi Bali mencapai sekitar 6 orang anak per penduduk perempuan selama masa reproduksinya. Demikian parahnya kondisi fertilitas di Indonesia pada awal-awal pembangunan lima tahun (Pelita) era Orde Baru yang dimulai tahun 1969/70-1973/74. Melalui program KB, permasalahan-permasalahan seperti kependudukan seperti dipaparkan di atas diharapkan dapat teratasi.



Sumber: BPS, 2020

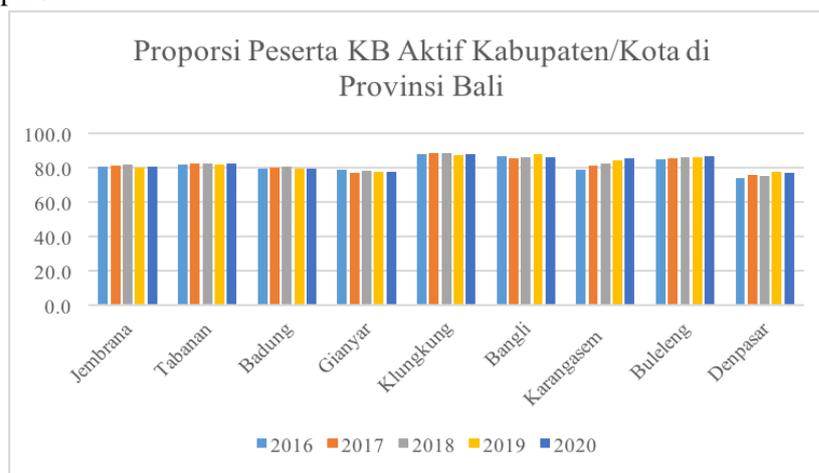
Gambar 1.
TFR masing-masing Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2020

Memperhatikan kondisi di atas terungkap bahwa proporsi KB aktif selama masa Reformasi di Provinsi Bali cenderung menurun, sementara angka TFR bersifat fluktuatif. Berangkat dari kecenderungan, baik perkembangan proporsi peserta KB aktif maupun TFR seperti di atas, maka menarik untuk dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan peserta KB aktif maupun perkembangan angka TFR (fertilitas) pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Davis & Blake (1956), bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi fertilitas yaitu variabel sosial meliputi variabel ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara

variabel antara meliputi (1) Hubungan suami istri; (2) Proporsi perempuan yang tidak pernah berhubungan kelamin; (3) Lamanya masa reproduksi yang hilang; (4) Berpantang secara sukarela; (5) Berpantang secara terpaksa; (6) Frekuensi hubungan seks; (7) Kesuburan dan kemandulan biologis; (8) Kesuburan dan kemandulan disengaja (steril); (9) Pemakaian alat kontrasepsi; (10) Kematian janin secara tidak sengaja dan (11) Kematian janin secara sengaja. Terakhir, sebagai variabel terikat (dependen) adalah fertilitas atau kelahiran.

Menurut Mantra dalam Fitri (2016), tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor demografi yang berkaitan dengan pengetahuan usia subur tentang manfaat dan tujuan program keluarga berencana yaitu dengan cara pengaturan kelahiran yang dapat menekan tingkat fertilitas dan meningkatkan kualitas penduduk. Menurut teori Malthus, peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan tergerusnya sumber daya alam karena pada umumnya pertumbuhan penduduk terjadi menurut deret ukur sedangkan alat pemuas kebutuhan meningkat menurut deret hitung. Kemiskinan menyebabkan PUS tidak mampu untuk mengikuti program KB sehingga kebanyakan warga yang tergolong miskinlah yang memiliki banyak anak. Variabel ketiga yaitu pengeluaran pemerintah. Program pengendalian penduduk melalui pengendalian kelahiran tidak mungkin dapat terlaksana dan berhasil dengan baik apabila tidak ditopang dengan dukungan pendanaan yang cukup. Pada penelitian Uppun (2016) menghasilkan bahwa berkurangnya setiap alokasi anggaran untuk pengendalian kelahiran baik jumlah anggaran maupun persentase relatifnya terhadap total anggaran di setiap kabupaten di Sulawesi disertai dengan perubahan yang sangat kecil pada angka prevalensi KB diduga menjadi pemicu tingginya kenaikan jumlah kelahiran di daerah tersebut.

Menurut Marhaeni, dkk (2019) sebelum program KB Nasional dilaksanakan pada sekitar tahun 1970an di Provinsi Bali, tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali tergolong sangat tinggi. Hal ini dapat dikatakan bahwa program KB yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali yaitu dari 1,69 persen per tahun (1971-1980) menjadi 1,18 persen per tahun (1980-1990) (Hasil Sensus Penduduk 1971, 1980, & 1990). Berdasarkan Proporsi peserta KB aktif menurut kabupaten/kota menunjukkan angka-angka yang bervariasi. Misalnya selama periode 2016-2020, proporsi KB aktif di Kabupaten Buleleng berkisar antara 84,7 persen sampai 86,6 persen. Sementara itu di Kabupaten Klungkung berkisaran antara 87,7 persen sampai 87,9 persen.



Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Bali 2019

Gambar 2.
Proporsi Peserta KB Aktif Kabupaten/Kota Provinsi Bali (Tahun) 2016-2020

Peserta KB aktif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Peserta KB dengan jumlah tertinggi yaitu di Kabupaten Klungkung dengan bertambah setiap tahunnya persentase peserta KB aktif dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yaitu sebesar 87,7 persen pada tahun 2016, dan pada tahun 2020 sebesar 87,9 persen. Kota Denpasar adalah kabupaten dengan jumlah peserta KB aktif paling rendah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dimana pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar 73,9 persen dan pada tahun 2020 sebesar 76,9 persen.

METODE PENELITIAN

Desain atau rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berbentuk asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki proporsi peserta KB aktif dan tingkat fertilitas yang bervariasi. Selain itu, lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan pengambilan data. Apabila data yang dibutuhkan tidak tersedia di BPS akan dilakukan penelusuran data di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) setempat. Adapun variabel yang akan menjadi objek utama penelitian ini yakni persentase kemiskinan, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah, proporsi peserta KB aktif dan tingkat fertilitas (kelahiran). Variabel bebas dalam penelitian ini ialah tingkat kemiskinan (X_1), tingkat pendidikan (X_2), pengeluaran pemerintah (X_3), variabel mediasi ialah variabel proporsi peserta KB aktif (Y_1), dan variabel terikat pada penelitian ini ialah variabel fertilitas (Y_2). Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, pengeluaran pemerintah, proporsi peserta KB aktif dan TFR yang bersumber dari data sekunder yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN).

Penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Bali yakni terdiri dari delapan (8) kabupaten dan satu (1) kota dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2016-2020. Jadi jumlah titik pengamatan adalah 45 buah, yang merupakan gabungan antara data deret waktu (*time series*) dengan jumlah kabupaten/kota. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara mendalam. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Model *path analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) melalui variabel mediasi (*intervening variable*) (Ridwan & Kuncoro, 2011). Persamaan model analisis jalur dalam penelitian ini yaitu:

$$Y_1 = a_0 + a_1X_1 + a_3X_2 + a_5X_3 + e_1 \dots\dots\dots(2)$$

$$Y_2 = a_0 + a_2X_1 + a_4X_2 + a_6X_3 + a_7Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

Y_1	= Proporsi peserta KB aktif
Y_2	= Fertilitas
a_0	= Konstanta
$a_{1,2,3,4,5,6,7}$	= Koefisien regresi
X_1	= Persentase penduduk miskin
X_2	= Tingkat pendidikan
X_3	= Pengeluaran pemerintah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data menggunakan statistik deskriptif memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian yang terdiri dari jumlah pengamatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), beserta standar deviasi. Tabel 1 menampilkan hasil pengolahan data statistik deskriptif.

Tabel 1.
Hasil pengolahan data statistik deskriptif variabel-variabel penelitian

Variabel	Satuan	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
Persentase Penduduk Miskin (X1)	Persen	45	1,78	6,55	4,40	1,33
Tingkat Pendidikan (X2)	Tahun	45	5,52	11,47	8,30	1,50
Pengeluaran Pemerintah (X3)	Juta Rupiah	45	7,40	8362,50	966,59	1384,76
Proporsi Peserta KB Aktif (Y1)	Persen	45	74,00	88,00	82,13	3,52
Fertilitas (Y2)	Orang	45	1,88	2,69	2,25	0,25

Sumber: Data primer diolah, 2022

Variabel persentase penduduk miskin memperoleh nilai minimum sebesar 1,78 dan nilai maksimum 6,55, nilai rata-rata sebesar 4,40 dengan deviasi standar 1,33. Hal ini dapat diartikan bahwa persentase terendah untuk penduduk miskin selama 5 tahun adalah 1,78 persen dan persentase tertinggi sebesar 6,55 persen. Jika dirata-ratakan persentase penduduk miskin selama 5 tahun sebesar 4,40 persen. Deviasi standar bernilai kurang dari rata-rata sehingga dapat disimpulkan bahwa data kurang bervariasi. Variabel tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah memperoleh nilai minimum sebesar 5,52 dan nilai maksimum 11,47. Data menunjukkan nilai mean sebesar 8,30 dengan deviasi standar 1,50. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan penduduk paling rendah hanya sampai kelas 5 SD dan pendidikan tertinggi pada jenjang SMA kelas XI (11 tahun). Jika dirata-ratakan, tingkat pendidikan penduduk keseluruhan adalah selama 8,30 tahun. Nilai deviasi standar lebih rendah dari nilai rata-rata hal tersebut berarti data kurang bervariasi.

Variabel pengeluaran pemerintah memperoleh nilai minimum sebesar Rp 7.400.000,00 dan nilai maksimum Rp 8.362.500.000,00. Data menunjukkan nilai mean sebesar Rp 966.594.400,00 dengan deviasi standar Rp 1.384.762.000,00. Hal ini dapat diartikan bahwa selama rentang 5 tahun, pengeluaran pemerintah terkait penanganan permasalahan fertilitas paling sedikit sebesar Rp 7.400.000,00 dan paling banyak sebesar Rp 8.362.500.000,00. Rata-rata pengeluaran pemerintah selama tahun 2016-2020 adalah sebesar Rp 966.594.400,00. Nilai deviasi standar lebih besar dari nilai rata-rata maka itu berarti data cukup bervariasi. Variabel Proporsi peserta KB aktif memperoleh nilai minimum sebesar 74 dan memiliki nilai maksimum sebesar 88. Nilai rata-rata proporsi peserta KB aktif adalah 82,13 dengan deviasi standar 3,52. Hal ini dapat diartikan bahwa proporsi peserta KB aktif paling sedikit sebesar 74 persen dan paling banyak sebesar 88 persen pada kurun waktu 2016-2020. Rata-rata proporsi peserta KB aktif sebesar 82,3 persen. Nilai deviasi standar kurang dari nilai rata-rata sehingga dapat dikatakan bahwa data kurang bervariasi.

Variabel tingkat fertilitas memperoleh nilai minimum sebesar 1,88 dan memiliki nilai maksimum sebesar 2,69. Nilai rata-rata tingkat fertilitas adalah 2,25 dengan deviasi standar 0,25. Hal ini dapat diartikan bahwa paling sedikit tingkat fertilitas di masing-masing kabupaten di Provinsi Bali adalah sebanyak 1,88 orang dan paling banyak 2,69 orang. Rata-rata tingkat fertilitas adalah sebesar 2,25 orang selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dapat diartikan pula bahwa nilai deviasi standar lebih kecil dari rata-rata sehingga data kurang bervariasi.

Tabel 2.
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Struktur	Persamaan	R Square	Adjusted R Square
1	$Y_1 = -0,078 X_1 + 0,776 X_2 + 0,276 X_3 + e_1$	0,715	0,694
2	$Y_2 = 0,075 X_1 - 0,759 X_2 - 0,126 X_3 - 0,294 Y_1 + e_2$	0,804	0,784

Sumber: Data primer diolah, 2021

Persamaan struktur 1 diperoleh nilai koefisien determinasi atau *adjusted R square* sebesar 0,694. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sebesar 69,4 persen variabel proporsi peserta KB aktif dipengaruhi oleh variabel persentase penduduk miskin (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dan pengeluaran pemerintah (X_3) dan sisanya sebesar 30,6 persen dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak dijelaskan pada model. Koefisien determinasi atau *adjusted R square* struktur 2 sebesar 0,784. Hal ini berarti sebesar 78,4 persen variabel fertilitas (Y_2) dipengaruhi oleh variabel persentase penduduk miskin (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dan pengeluaran pemerintah (X_3) dan proporsi peserta KB aktif (Y_1), dan sisanya sebesar 21,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model ini.

Tabel 3.
Pengaruh Langsung dan Pengaruh tidak Langsung serta Pengaruh Total Variabel Penelitian

Regresi	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung Melalui Proporsi peserta KB aktif (Y)	Pengaruh Total
$X_1 \longrightarrow Y_1$	-0,078	-	-0,078
$X_1 \longrightarrow Y_2$	0,075	$(-0,078 \times -0,294) = 0,023$	0,098
$X_2 \longrightarrow Y_1$	0,776	-	0,776
$X_2 \longrightarrow Y_2$	-0,759	$(0,776 \times -0,294) = -0,228$	-0,987
$X_3 \longrightarrow Y_1$	0,276	-	0,276
$X_3 \longrightarrow Y_2$	-0,126	$(0,276 \times -0,294) = -0,081$	-0,207
$Y_1 \longrightarrow Y_2$	-0,294	-	-0,294

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil *t-test*, diketahui bahwa nilai signifikansi atau *p-value* sebesar 0,720, dimana nilai ini lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Selain itu dari uji regresi diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,078. Dari kedua hasil uji ini dapat dijelaskan bahwa variabel persentase penduduk miskin berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap proporsi peserta KB aktif. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan penduduk miskin sebanyak 1 persen maka akan terjadi penurunan proporsi peserta KB sebanyak 0,078 persen. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kemiskinan absolut dimana sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, penduduk hidup dibawah pendapatan riil minimum atau dapat dikatakan hidup dibawah kemiskinan internasional (Todaro & Smith, 2006). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriani dan Karmini (2020) ditemukan bahwa beberapa alasan yang menjadi pertimbangan mengapa penduduk di Desa Kesiman tidak menggunakan KB salah satunya adalah karena mereka tidak memiliki biaya.

Berdasarkan hasil *t-test*, diketahui bahwa nilai *p-value* atau signifikansi untuk pengaruh tingkat pendidikan terhadap proporsi peserta KB aktif adalah sebesar 0,001 atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Hasil koefisien regresi diperoleh sebesar 0,776 dan bernilai positif. Hal ini berarti bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi peserta KB aktif. Hal ini menandakan apabila tingkat pendidikan meningkat sebesar 1 persen maka proporsi peserta KB

aktif akan meningkat sebesar 0,776 persen dengan asumsi faktor lainnya konstan. Hasil uji ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriani & Karmini (2020) yang mendapatkan hasil pengujian pengaruh tingkat pendidikan terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Desa Kesiman Kertalangu yaitu nilai signifikansi sebesar 0,029 dimana nilai ini kurang dari nilai $\alpha=0,05$ dan koefisien regresi diperoleh sebesar 0,274 dan bernilai positif yang artinya tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Desa Kesiman Kertalangu. Penelitian ini juga sesuai dengan teori Health Belief Model (1950) yang dikembangkan oleh Godfrey Hochbaum dan Irwin Rosenstock yang menyatakan bahwa kepercayaan seseorang dalam mengambil keputusan atau tindakan yang akan membuahkan hasil positif. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan memiliki cara berpikir dan pandangan yang lebih luas termasuk pandangan mengenai penggunaan alat kontrasepsi sehingga wanita yang berpendidikan tinggi lebih mudah menerima dan mencari informasi tambahan mengenai program keluarga berencana melalui berbagai platform.

Hasil *t-test* yaitu nilai signifikansi *p-value* = 0,004 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,276 dan bernilai positif. Hal ini berarti pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi peserta KB aktif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah terkait upaya menekan kelahiran sebesar 1 persen maka proporsi peserta KB aktif akan meningkat sebesar 0,276 persen dengan asumsi variabel lain nilainya konstan. Hal ini diperkuat dari sasaran strategis pemerintah di bidang kesehatan menurut Kementerian Keuangan. Sasaran strategis pemerintah yang terangkum dalam informasi APBN tahun 2017 mengutamakan imunisasi, jaminan kesehatan, prevelensi stunting, biaya operasional kesehatan dan keluarga berencana.

Berdasarkan hasil *t-test* untuk pengaruh langsung persentase penduduk miskin terhadap fertilitas, ditemukan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,004 dan nilai koefisien regresinya sebesar 0,075. Hal ini berarti persentase penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap fertilitas. Hal ini disebabkan karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α yang telah ditetapkan sebesar 0,05 dan berpengaruh positif disebabkan karena koefisien regresinya bernilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan persentase penduduk sebesar 1 persen, maka tingkat fertilitas akan meningkat sebesar 75 anak per 1000 perempuan persen dengan asumsi nilai variabel lain konstan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan berpengaruh ke berbagai sektor kehidupan manusia termasuk permasalahan demografi yaitu fertilitas. Menurut seorang penggiat sosial, penduduk miskin cenderung memiliki banyak anak disebabkan akses edukasi rendah, akses kesehatan rendah dan juga masalah sosiokultural.

Berdasarkan hasil *t-test* untuk pengaruh langsung tingkat pendidikan terhadap fertilitas, ditemukan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 dan nilai koefisien regresinya sebesar -0,759. Hal ini berarti tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fertilitas karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α yang ditetapkan yaitu 0,05 dan koefisien regresi bernilai negatif. Hal ini dapat juga diartikan bahwa setiap kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1 tahun maka fertilitas akan menurun sebanyak 759 anak per 1000 perempuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahab, dkk (2018) dimana diperoleh bahwa variabel pendidikan memiliki koefisien regresi sebesar -0,0614 dan nilai signifikansi sebesar 0,046. Hal ini berarti pendidikan terakhir berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fertilitas. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Adioetomo & Samosir (2010) yang menyatakan kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi semakin terbuka saat ini, sehingga menyebabkan banyak perempuan yang menunda perkawinan untuk menyelesaikan pendidikan yang diinginkan. Selain itu perempuan yang berpendidikan tinggi cenderung memilih terjun ke pasar kerja terlebih dahulu sebelum memasuki perkawinan. Jika seandainya menikah pada

usia muda, pengetahuan mereka tentang alat pencegahan kehamilan cukup tinggi sehingga sebagian dari mereka akan menunda kehamilan yang otomatis menunda kelahiran. Tingkat pendidikan menyangkut tentang perubahan sikap, perilaku, pandangan dan status sosial ekonomi suatu masyarakat. Seiring waktu berlalu, wanita memperoleh kesempatan pendidikan tidak hanya di daerah perkotaan saja, namun juga di daerah pedesaan. Tingkat pendidikan mempengaruhi usia perkawinan pertama yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat fertilitas.

Berdasarkan hasil uji *t-test* diperoleh bahwa nilai signifikansi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap fertilitas sebesar 0,041 dan nilai regresi diperoleh sebesar -0,126. Hal ini berarti pengeluaran pemerintah dalam upaya penekanan kelahiran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fertilitas. Dengan kata lain apabila pengeluaran pemerintah meningkat 1 persen maka tingkat fertilitas akan turun sebesar 126 anak per 1000 perempuan dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution, dkk (2021) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sehingga semakin banyak alokasi anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan maka indeks pembangunan manusia juga akan semakin baik. Indeks pembangunan manusia disini juga menyangkut mengenai tingkat fertilitas yang menurun.

Proporsi peserta KB aktif mampu memediasi persentase penduduk miskin terhadap fertilitas. Hal ini sesuai dengan teori Malthus yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan tergerusnya sumber daya alam karena pada umumnya pertumbuhan penduduk terjadi menurut deret ukur sedangkan alat pemuas kebutuhan meningkat menurut deret hitung. Peningkatan jumlah penduduk akan memicu kemiskinan khususnya pada negara berkembang. Kemiskinan yang terjadi akan menyebabkan PUS tidak mampu untuk mengikuti program KB sehingga kebanyakan warga yang tergolong miskinlah yang memiliki banyak anak karena rendahnya proporsi menggunakan KB. Atau bisa dikatakan warga miskin berkontribusi besar dalam peningkatan fertilitas di Indonesia dan di Bali khususnya. Apabila persentase penduduk miskin meningkat, maka semakin banyak penduduk yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya termasuk untuk menggunakan alat kontrasepsi maka proporsi peserta KB aktif akan menurun sehingga kondisi ini akan meningkatkan fertilitas di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yakni. Penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap proporsi peserta KB aktif artinya semakin banyak persentase penduduk miskin maka proporsi peserta KB aktif akan menurun. Sebaliknya tingkat pendidikan dan pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi peserta KB aktif di tiap kabupaten/kota Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin berpengaruh positif terhadap fertilitas, yang artinya semakin banyak penduduk miskin maka semakin besar tingkat fertilitas. Sebaliknya tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah dan proporsi peserta KB aktif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fertilitas. Proporsi peserta KB aktif mampu memediasi variabel persentase penduduk miskin, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap fertilitas karena masing-masing nilai *z* hitung diperoleh lebih besar dari 1.96.

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan di atas maka dapat diajukan beberapa saran yaitu. Upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai skema, seperti program bedah rumah, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan modal kerja atau kartu prakerja tetap digalakkan untuk menekan

persentase penduduk miskin. Upaya peningkatan pendidikan penduduk melalui berbagai program juga tetap digalakkan mengingat tingkat pendidikan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB dan penurunan fertilitas. Pengeluaran pemerintah terkait dengan kesehatan dan program KB tetap dijaga keberlanjutannya. Sosialisasi program KB agar terprogram dan terlaksana, serta terjaga keberlanjutannya.

REFERENSI

- Adioetomo, SM & Samosir, OB. (2010). *Dasar-Dasar Demografi Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ananta, Aris (Ed). (1993). *Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Demografi Lembaga penerbit FE UI.
- _____. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: FE UI.
- Apriani, Anak Agung Rai Inten & Karmini, Ni Luh (2020). Faktor Sosial Dan Ekonomi Yang Mempengaruhi Probabilitas Penggunaan Alat Kontrasepsi di Desa Kesiman Kertalangu, Vol.10, No.6, Hal. 2283-2312
- Budiadnyana, I N & Sandiasa, Gede. (2017). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PHK) Dalam Pengentas Kemiskinan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Vol. 8, No. 1, Hal. 1-13.
- Davis, Kingsley & Judith, Blake. (1956). Sosial Structure and Fertility: an Analytical Framework. *Economic Develoment and Cultural Change*, Vol. 4, No. 3.
- Didu, Saharuddin & Fauzi, Ferri. (2016). Pengruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak , Vol.6, No.1, Hal. 100-114.
- Fitri, Ayu, Trisnarningsih & Nani Suwarni . (2016). Hubungan Tingkat Pendidikan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dengan Jumlah Anak Yang Dilahirkan Wanita PUS.
- Goncalves., Marilia Juvi., Suariyani N.L.P & Suryadhi N.T. (2014). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Dengan Pemakaian Alat Kontrasepsi Pada PUS di Puskesmas Comoro Dili Timor, Vol. 2, No. 1, ISSN 2303-1816.
- Israwati. (2009). *Froximate Determinant Fertilitas di Indoneisa*. Jakarta: BKKBN.
- Kurniawati, Endah & Sugiyanto Catur. (2021). Pengaruh Struktur Umur Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indoneisa, Vol. 21, No. 1, Hal. 41-58.
- Listyaningsih, U., Sumini, S., & Satiti, S. (2016). Unmed Need: Konsep Yang Masih Perlu Diperdebatkan, Vol. 24, No. 1, Hal. 72-90.
- Marhaeni, Anak Agung Istri Ngurah & Ni Nyoman Yuliarmi. (2019). Eksistensi KB Sistem Banjar Pada Era Otonomi Derah Dalam Mendukung Program KB di Provinsi Bali, Hal. 14-23.
- Nasution Diwayana Putri., Daulay Riyib Muhammad., Handani Epi. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerinah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan. Vol.14, Hal 33-49
- Notoadmodjo, S. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka cipta.
- Olomola, P.A (2004). Cointegration Analysis Causalyti Testing and Wagner' s law : The Case Of Nigeria 1997-2001. *Jurnal of Social Economic Developmen* Vol. 6, No. 1, Hal. 76-90.
- Purwaningsih, Sri Sunarti (2021). Desentralisasi Program Keluarga Berencana (Tantangan dan Persoalan Kasus Provinsi Kalimantan Barat.Vol. 7, No. 2
- Rachmayani, Asiva Noor. (2015). Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Prilaku Penggunaan Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur (WUS) di Provinsi Sumatra Utara (Data SKDI Tahun 2012) .
- Rapanna Patta & Fajriah Yana. (2018). *Menembus Badai Ekonomi*. Sah Media.
- Rohmawati, Ely. (2011). Perbedaan Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Penyuluhan Tentang Kontrasepsi Impan (Studi Pada WUS di Rw IV Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang).
- Soleha, Siti. (2016). Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Pasar Utara, Vol. 4, No. 1, Hal 39-52
- Sudibia, I ketut. (1991). *Penduduk Indonesia Selama pembangunan Jangka Panjang Tahap I*. Bali: Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
- Todaro, M.P & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* . Jakarta : Erlangga.
- Trisnu, Cokorda Gede Surya Putra & Sudibia, I Ketut. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Vol. 8, No.11, Hal 2622-2655.
- Uppun, Paulus. (2016). Dampak Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan KB dan Pengendalian Kelahiran di Provinsi Sulawesi Selatan, Vol. XII, No. 2, Hal. 59-71.

-
- Wahab, Abdul & Junaidi, Edi Jaya. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fertilitas Wanita Bekerja Pada Rumah Tangga Miskin di Kabupten Muaro Jambi (Study Kasus Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi), Vol 7, No. 3, hal. 124-131
- Wauran. (2018). Analisis Perekonomian Makro Dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon, Vol. 18, No. 6, Hal 93-100